

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
(Studi tentang Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Tolitoli
Provinsi Sulawesi Tengah)**

Wahyudhi Herald

NPP. 31.0875

Asdaf Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Studi Kebijakan Public

Email: wahyudhiherald17@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mutia Rahmah, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Flooding remains one of the disasters that occur in Indonesia to this day, including in Tolitoli Regency. To address this issue, the Tolitoli Regency Government has established policies on Disaster Management Implementation. One of the objectives of these policies is to minimize the impact of natural disasters, non-natural disasters, and social disasters. However, in reality, these policies have not yet achieved the desired goals. **Purpose:** This research aims to identify and analyze the supporting and inhibiting factors of disaster management policy implementation, as well as to formulate efforts to optimize the implementation of this policy. **Method:** This research uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used include data condensation, data presentation, and conclusion drawing/verification. This research employs the policy implementation theory by Knill & Tosun (2020). Informants were determined using purposive sampling and snowball sampling techniques. **Result:** The results show that the supporting factors for the implementation of disaster management policies include the clarity of policy design covering procedures, time, and resources, as well as changes in flood disaster management targets, the availability of a supervisory structure including supervision by the community and by supervisory bodies, the clarity of institutional design covering implementing organizations and internal and inter-organizational coordination, the availability of necessary resources (human resources, finance, technology, and information), the ability to implement disaster management SOPs, and high social acceptance including the level of benefits perceived by the community and community involvement. The inhibiting factors include the inappropriateness of policy instrument choices and the difficulty of implementing flood disaster management policies, as well as low administrative capacity due to a lack of necessary resources (human resources, finance, technology, and information). **Conclusion:** Research results show that the implementation of flood disaster management policies is relatively good, but there are some obstacles such as a lack of personnel skills, equipment, and information technology that hinder the execution of these policies. Therefore, follow-up actions are needed to optimize the implementation so that the objectives of these policies can be achieved.

Keywords: implementation, disaster management, flooding

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Banjir menjadi salah satu bencana yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, salah satunya di Kabupaten Tolitoli. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Tolitoli telah menetapkan kebijakan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Salah satu tujuan kebijakan tersebut adalah meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial. Namun kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana serta mengetahui dan merumuskan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020). Penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan penanggulangan bencana adalah kejelasan desain kebijakan mencakup prosedur, waktu, dan sumberdaya serta perubahan target penanggulangan bencana banjir, ketersediaan struktur pengawasan mencakup pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas, kejelasan desain kelembagaan mencakup organisasi pelaksana dan koordinasi internal dan antar organisasi, ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan (sdm, keuangan, teknologi dan informasi, kemampuan melaksanakan sop penanggulangan bencana banjir, tingginya penerimaan sosial mencakup tingkat kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dan keterlibatan masyarakat. Adapun faktor penghambat adalah ketidaktepatan pilihan dan kesulitan pelaksanaan instrumen kebijakan penanggulangan bencana banjir dan rendahnya kemampuan administratif berupa kurangnya sumberdaya yang dibutuhkan (SDM, keuangan, teknologi dan informasi). **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir tergolong baik, namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kemampuan personil, peralatan dan teknologi informasi yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga perlu ada tindaklanjut untuk mengoptimalkan pelaksanaannya sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Kata Kunci: implementasi, penanggulangan bencana, banjir

I. PENDAHULUAN

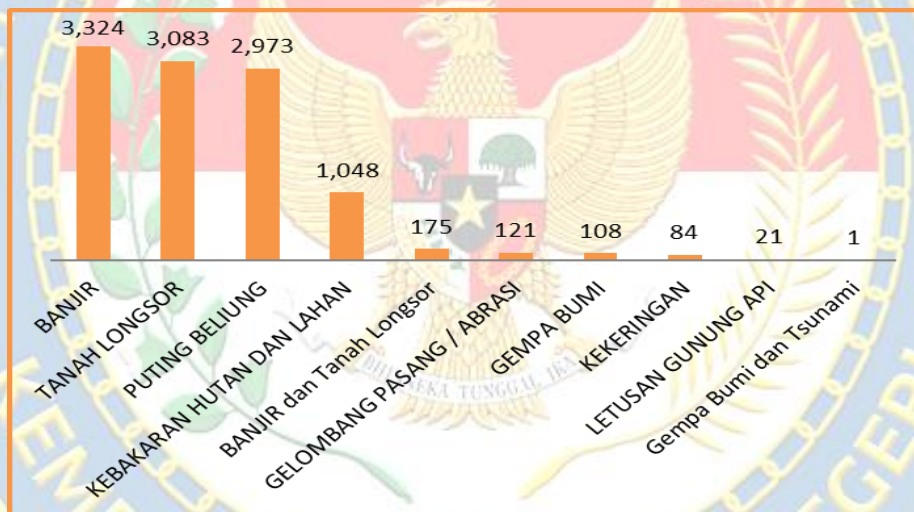
1.1. Latar Belakang

Banjir adalah fenomena alam yang terjadi ketika air permukaan, seperti air sungai, air hujan, atau air laut, meluap dan menggenangi daratan (Muhammad & Aziz, 2020). Silalahi & Harahap (2021) menjelaskan bahwa banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari alam dan faktor yang berasal dari aktivitas manusia. Banjir yang disebabkan oleh alam dapat terjadi karena kondisi alam, seperti curah hujan yang tinggi, fisiografi, erosi, kapasitas sungai, kapasitas drainase, dan sedimentasi. Banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat terjadi karena ulah manusia, seperti penebangan hutan, pembuangan sampah sembarangan, dan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Banjir menjadi salah satu bencana yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Hal ini terlihat dari berbagai kejadian bencana alam di Indonesia dari tahun 2020 – 2022 sebagaimana tertera pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Jumlah Kejadian Bencana Alam yang Dialami di Indonesia Tahun 2020 – 2022



Sumber: Diolah dari BNPB (2023)

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2023), jumlah kejadian bencana banjir yang terjadi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 1.531 kejadian bencana banjir dan pada tahun 2021 mengalami penurunan, yakni sebanyak 1.195 kejadian bencana banjir. Pada tahun 2022, penurunan kembali terjadi, yakni terdapat 598 kejadian bencana banjir. Lebih lanjut, data di 10 (sepuluh) Provinsi dengan kejadian bencana banjir terbanyak di Indonesia dan rata-rata curah hujan tahun 2020-2022 tersaji pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Sepuluh Provinsi dengan Jumlah dan Rata-Rata Kejadian Bencana Banjir Terbanyak di Indonesia dan Curah Hujan Tahun 2020-2022

| No | Provinsi | Jumlah Bencana Banjir (kejadian) | | | Rata-Rata Bencana Banjir Pertahun (kejadian) | Rata-Rata Curah Hujan Tahun 2020-2022 (mm) |
|----|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | Jawa Tengah | 254 | 276 | 211 | 247 | 2546,1 |
| 2 | Jawa Barat | 217 | 120 | 38 | 125 | 3867,2 |
| 3 | Jawa Timur | 136 | 125 | 66 | 109 | 2546,9 |
| 4 | Sumatera Utara | 76 | 64 | 19 | 53 | 2851,2 |
| 5 | Sumatera Selatan | 60 | 21 | 77 | 53 | 2825,7 |
| 6 | Sulawesi Tengah | 43 | 60 | 48 | 50 | 944,7 |
| 7 | Aceh | 81 | 56 | 1 | 46 | 1972,4 |
| 8 | Kalimantan Selatan | 64 | 41 | 5 | 37 | 3153,6 |
| 9 | Kalimantan Barat | 50 | 55 | 2 | 36 | 3210,7 |
| 10 | Lampung | 25 | 20 | 54 | 33 | 2215 |

Sumber: Diolah dari BNPB, 2023; BPS, 2023

Berdasarkan data Tabel 1.1, menunjukkan Provinsi Sulawesi Tengah berada di urutan ke 6 dari 10 provinsi dengan jumlah banjir terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2020, kejadian bencana banjir di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 43 kejadian. Pada tahun 2021, kejadian bencana banjir sebanyak 60 kejadian, atau mengalami kenaikan sebanyak 28% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, kejadian bencana banjir sebanyak 48 kejadian atau mengalami penurunan sebanyak 25% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian bencana banjir dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami fluktuasi.

Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa meskipun tidak berada di urutan pertama namun rata-rata curah hujan di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2020 sampai 2022 tergolong paling rendah dibandingkan 10 Provinsi dengan kejadian banjir terbanyak di Indonesia, yakni rata-rata 944,7 mm per tahun. Dilihat dari data kabupaten/kota, data jumlah kejadian bencana banjir di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota dalam 3 tahun terakhir yang tersaji pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Jumlah dan Rata-Rata Kejadian Bencana Banjir di Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2022

| NO | KABUPATEN/KOTA | Jumlah Bencana Banjir (kejadian) | | | Rata-Rata Bencana Banjir Pertahun (kejadian) |
|----|-------------------|-------------------------------------|------|------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Tolitoli | 50 | 46 | 32 | 42.7 |
| 2 | Poso | 15 | 35 | 39 | 29.7 |
| 3 | Buol | 37 | 11 | 22 | 23.3 |
| 4 | Parigi Moutong | 20 | 24 | 20 | 21.3 |
| 5 | Sigi | 31 | 12 | 19 | 20.7 |
| 6 | Morowali Utara | 41 | 12 | 4 | 19.0 |
| 7 | Donggala | 11 | 18 | 17 | 15.3 |
| 8 | Banggai | 12 | 8 | 25 | 15.0 |
| 9 | Tojo Una-una | 13 | 6 | 7 | 8.7 |
| 10 | Banggai Kepulauan | 15 | 3 | 4 | 7.3 |
| 11 | Banggai Laut | - | 8 | 3 | 5.5 |
| 12 | Palu | 3 | 9 | 3 | 5.0 |
| 13 | Morowali | 6 | 3 | 2 | 3.7 |

Sumber: Diolah dari BPBD Prov. Sulawesi Tengah (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, jumlah bencana banjir di Kabupaten Tolitoli dari tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah kejadian bencana banjir mencapai 50 kejadian. Pada tahun 2021, jumlah bencana banjir mencapai 46 kejadian dengan penurunan sebanyak 9% dari jumlah kejadian tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, kejadian bencana banjir menurun menjadi 32 kejadian dengan penurunan sebanyak 30% dari jumlah kejadian tahun sebelumnya.

1.2. Kesenjangan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi fokus oleh peneliti dalam penelitian adalah berdasarkan jumlah warga terdampak banjir meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 dimana pada tahun 2020 jumlah warga terdampak banjir mencapai 1.446, pada tahun 2021 mencapai 1.997, dan pada tahun 2022 mencapai 2.568 warga yang terdampak banjir. Selain itu, banyak peralatan yang tidak layak digunakan atau mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana khususnya banjir belum berhasil mencapai tujuan kebijakan. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana banjir di toli-toli adalah sebagai berikut:

1. Setiap tahun terjadi peningkatan warga terdampak banjir yang cukup signifikan didasarkan kepada data warga yang terdampak akibat banjir di Kabupaten Toli-Toli tahun 2020 hingga tahun 2022.

2. Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Toli-Toli belum maksimal karena kurangnya peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Kabupaten Tolitoli
3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana banjir belum maksimal dan optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam metode penelitian, upaya penanganan, maupun dinas atau badan dalam proses penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Toli-Toli. Penelitian Hinfa Mosshanaza dan Fajar Kurniadi yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Sidomulyo (Kurniadi,2022) menemukan Koordinasi sudah dinilai efektif, akan tetapi masih terdapat kendala khususnya kurangnya sumber daya manusia di daerah rawan bencana dan lambatnya respon penanganan layanan kesehatan dan evakuasi masyarakat terdampak. Selanjutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Kletus Marselinus Wurin dan Dr. Hendro Wardhono, M.Si yang berjudul Evaluasi Implementasi Penanganan Bencana Banjir Di Desa Lamanela Kecamatan Itebolong Nusa Tenggara Timur. (Wardhono,2022) yang menemukan bahwa Evaluasi pelaksanaan upaya penanggulangan banjir di Desa Lamanela mendapat penilaian positif dari sebagian warga, tetapi masih perlu perbaikan dalam aspek komunikasi serta peningkatan kerja sama antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, disertai fasilitas penanggulangan banjir yang lebih memadai. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Yusup, Hanny Purnamasari, dan Kariena Febriantini yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kota Bekasi. (Febriantini,2022), dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif telah menghambat realisasi kebijakan, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, respons pemerintah masih lambat dan diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan banjir. Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Anita Dwi, Tri Yulianti dan Adi Susiantoro yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Pada Tahap Tanggap Darurat Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Susiantoro,2022) diperoleh hasil penelitian yaitu Implementasi kebijakan BPBD Sidoarjo berjalan dengan baik. Namun, terbatasnya sumberdaya serta anggaran, dan fasilitas yang kurang mendukung dalam pelaksanaannya sehingga belum berjalan dengan optimal. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lidia Eka Putri dan Zikri Alhadi yang berjudul Evaluasi Peran Pemerintah Nagari Aia Gadang Dalam Menghadapi Ancaman Banjir (Alhadi,2022) yang mengemukakan bahwa Pemerintah Nagari Aia Gadang dalam menghadapi ancaman bencana banjir dinilai telah memenuhi perannya, meskipun kurang baik disebabkan tidak adanya program khusus yang mengatur. Kendala yang dihadapi termasuk tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang rendah serta kendala anggaran yang masih kurang. Keenam, penelitian yang dilaksanakan oleh Novan Suryadi yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda (Suryadi,2020) adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa Penelitian ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam mengatasi banjir di Kota Samarinda dinilai positif. Namun, masih ada kendala yang perlu diatasi, seperti kelemahan

pengawasan pemerintah terhadap tindakan penebangan pohon secara besar-besaran. Ketujuh, penelitian yang dilaksanakan oleh Dede Saidah yang berjudul Dede Saidah (2020) Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan) (Saidah, 2020), mengemukakan bahwa Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir di Kelurahan Pondok Pinang belum optimal. Adapun hambatan yang muncul disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan dedikasi dari pihak pelaksana, serta minimnya dukungan dan keterlibatan masyarakat. Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Feny Irfany Muhammad dan Yaya M Abdul Aziz yang berjudul Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot (Aziz,2020) berdasarkan hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pasca bencana bencana banjir oleh BPBD Dayeuhkolot belum mencapai hasil optimal karena terkendala oleh isu-isu terkait rehabilitasi dan rekonstruksi. Kesembilan, penelitian yang dilaksanakan oleh M Edwin Fransiari, Sonny Priajaya Warouw, Netty Etalia Brahmama yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Masyarakat Kota Medan Tahun 2022 (Brahmama, 2020) mengemukakan bahwa penanggulangan banjir di Kota Medan cukup berhasil, lebih dari setengah responden menilai positif. Struktur birokrasi sebagai faktor yang dominan dalam memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Terakhir, penelitian yang dilaksanakan oleh Suharto dan Andre Setiawan yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Bpbd Kota Semarang Tahun 2020) (Setiawan,2020) adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa melalui penerapan Teknologi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) bertujuan mengurangi dampak bencana dan melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, kelompok peduli, dan sektor swasta.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis memiliki perbedaan pada aspek atau variabel yang diteliti, sehingga memiliki perbedaan atau kebaruan dan persamaan dalam paradigma penelitian. Persamaan yang dimiliki salah satunya adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis sama dengan metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu metode kualitatif deskriptif dan persamaan lainnya yaitu dilihat dari dinas atau badan sebagai pelaksana yang membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir yaitu sama-sama menggunakan BPBD sesuai dengan daerah masing-masing. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada teori penelitian yang digunakan oleh penulis, teori yang digunakan adalah teori implemetasi kebijakan oleh Knill dan Tosun yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh penelitian terdahulu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.

1.5. Tujuan

Penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana (studi tentang penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah).
2. Untuk mengetahui dan merumuskan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan penanggulangan bencana (studi tentang penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020). Penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan analisis terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Toli-Toli. Teori Implementasi Kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah konsep penertiban yang dikemukakan oleh Knill & Tosun (2020) yang memiliki enam dimensi, yaitu Pilihan Instrumen Kebijakan, Deain Kebijakan, Struktur Pengawasan, Desain Kelembagaan, Kemampuan Administratif, Penerimaan Sosial.

3.1. Pilihan Instrumen Kebijakan

Pemerintah yang memiliki kapasitas tinggi dalam menghadapi lingkungan kebijakan yang kompleks dapat menggunakan instrumen arahan, Pemerintah yang berkapasitas tinggi dihadapkan pada lingkungan yang sederhana menggunakan instrumen berwenang, seperti membentuk komisi atau komite penasihat khusus. Sebaliknya, pemerintah yang memiliki kapasitas rendah untuk menghadapi lingkungan kebijakan yang kompleks dapat mengandalkan instrumen subsidi seperti hibah atau skema pendanaan tertentu untuk mendorong penerima kebijakan agar mematuhi ketentuan kebijakan.

Kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli merupakan masalah yang kompleks. Hal ini terlihat dari banyaknya aktor yang terlibat, berbagai tujuan yang ingin dicapai, dan banyaknya pilihan alternatif yang tersedia. Sedangkan kapasitas dari BPBD rendah yang dibuktikan tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk penanggulangan bencana banjir.

a. Ketepatan Instrumen

BPBD Kabupaten Tolitoli saat ini telah melaksanakan program atau kegiatan pembentukan DESTANA, KMPB, dan, sosialisasi. Namun, kompleksitas kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tolitoli tergolong tinggi, sementara kapasitas yang dimiliki BPBD Kabupaten Tolitoli tergolong rendah, sehingga instrumen yang digunakan berupa subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang saat ini digunakan BPBD Kabupaten Tolitoli belum tepat.

b. Kemudahan Pelaksanaan Instrumen

Pelaksanaan instrumen dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli mudah untuk dilakukan. Namun, personil yang ada belum mencukupi dan anggaran penanggulangan bencana banjir masih kurang karena tiap tahunnya mengalami penurunan, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa penerapan instrumen yang dilakukan BPBD Kabupaten Tolitoli tidak mudah.

3.2. Desain Kebijakan

a. Kejelasan Prosedur, Waktu, dan Sumber Daya

BPBD Kabupaten Tolitoli sudah memiliki SOP sendiri yang mengatur jalannya penanggulangan bencana banjir dan pada SOP tersebut sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya. BPBD Kabupaten Tolitoli juga telah sumber daya yang jelas seperti personil yang berjumlah 65 orang, sedangkan anggaran BPBD telah dianggarkan setiap tahunnya.

b. Jumlah Perubahan Target atau Tujuan Kebijakan dari Desain Awal Kebijakan

BPBD telah menetapkan target setiap tahunnya untuk mengukur kinerja BPBD Kabupaten Tolitoli. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan capaian yang tidak mencapai dari target yang ditentukan. Hal ini yang akan menjadi evaluasi BPBD Kabupaten Tolitoli.

3.3. Struktur Pengawasan

a. Pengawasan oleh Masyarakat

Hingga saat ini masyarakat telah melakukan peran aktif dalam pengawasan terhadap upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD seperti melakukan pemantauan dan melaporkan kejadian banjir. aduan masyarakat dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, terjadi 29 pengaduan, menunjukkan tingkat pengaduan yang cukup tinggi di awal periode tersebut. Pada tahun 2022, jumlah pengaduan meningkat menjadi 30 pengaduan, menunjukkan kenaikan tingkat pengaduan dibandingkan tahun 2021. Namun, pada tahun 2023, jumlah pengaduan menurun drastis menjadi 11, menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat pengaduan di tahun 2023.

b. Pengawasan oleh Badan Pengawas

Badan pengawas dapat memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik dalam mengurangi risiko dan dampak bencana banjir. Dalam Penanggulangan bencana di Kabupaten Tolitoli, inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan penting dalam mengawasi BPBD Kabupaten Tolitoli. Pengawasan ini juga membantu memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan dengan optimal dan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan standar keselamatan dan keberlanjutan.

3.4. Desain Kelembagaan

a. Jumlah Organisasi Pelaksana

Kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli sangat tergantung pada jumlah organisasi pelaksana yang ada. Terdapat kolaborasi yang signifikan antara lembaga pemerintah, LSM, yayasan amal, dan sektor swasta dalam upaya mengurangi dampak bencana. Keterlibatan berbagai entitas ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyelamatkan nyawa, mendukung pemulihan, dan membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana yang semakin kompleks.

b. Koordinasi Internal dan antar Organisasi

Koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Tolitoli dengan berbagai instansi dan pihak terkait merupakan kunci sukses dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli. Koordinasi dilakukan melalui rapat, pembentukan tim gabungan, dan komunikasi rutin, baik di tingkat internal maupun dengan organisasi lainnya, sehingga pertukaran informasi dan pembagian peran dalam penanggulangan bencana banjir menjadi lebih jelas. Dengan demikian, skema koordinasi yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Tolitoli menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tahap dari prabencana hingga pascabencana.

3.5. Kemampuan Administratif

a. Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan (SDM, keuangan, teknologi dan informasi)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli memiliki sebanyak 65 personil yang siap bertugas dalam penanggulangan bencana. Anggaran tersedia telah dan dialokasikan untuk mendukung kegiatan BPBD dalam tiga tahun terakhir. Dari segi peralatan, tersedia 18 jenis peralatan yang dapat digunakan dalam proses penanggulangan bencana. Selain itu, BPBD Kabupaten Tolitoli juga menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram sebagai saluran informasi untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait bencana kepada masyarakat.

b. Kecukupan Sumber Daya Yang Dibutuhkan (SDM, Keuangan, Teknologi, dan Informasi)

BPBD Kabupaten Tolitoli mengalami beberapa masalah yang perlu segera ditangani. Pertama, terdapat kekurangan personil terutama di bidang pencarian dan pertolongan, yang dapat menghambat respons cepat dalam situasi bencana. Kedua, adanya penurunan anggaran dalam tiga tahun terakhir memberikan dampak negatif pada kemampuan operasional BPBD. Ketiga, meskipun BPBD memiliki beberapa peralatan penanggulangan bencana, namun masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Media sosial BPBD masih belum aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

c. Kemampuan Melaksanakan SOP

SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan hal yang sangat penting dan wajib diikuti dalam BPBD Kabupaten Tolitoli, terutama dalam konteks penanggulangan bencana banjir. SOP menjadi pedoman untuk memastikan respons yang efektif dan terkoordinasi dalam situasi darurat. Dengan menerapkan SOP dengan baik, BPBD Kabupaten Tolitoli telah mampu melaksanakan penanggulangan bencana dengan

baik. Berbagai tahapan dari persiapan hingga respons darurat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3.6. Penerimaan Sosial

a. Tingkat Kemanfaatan yang Dirasakan oleh Masyarakat

Respons BPBD dinilai beragam oleh masyarakat, ada yang merasa puas dan ada yang merasa belum puas dan merasa perlu adanya peningkatan pelayanan dari BPBD. Sebagian masyarakat merasa puas dengan kinerja BPBD dalam menghadapi situasi darurat dan memberikan layanan yang memadai. Namun, ada juga yang merasa belum puas dan menilai bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, evaluasi terhadap kinerja BPBD dan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu terus dilakukan guna memastikan peningkatan responsivitas dan efektivitas dalam menghadapi bencana.

b. Keterlibatan Masyarakat

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tolitoli saat ini lebih menitikberatkan pada membangun ketangguhan masyarakat sebelum bantuan pemerintah tiba. Program-program seperti keluarga tangguh bencana dan kelompok masyarakat peduli bencana telah dibentuk untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan bencana. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi tercermin dari partisipasi aktif dalam program-program BPBD setempat. Masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh BPBD. Hal ini menunjukkan pemahaman yang baik akan pentingnya kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi berbagai bencana.

3.7. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan penanggulangan bencana (studi tentang penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah) sebagai berikut:

- a. Kejelasan desain kebijakan mencakup prosedur, waktu, dan sumberdaya serta perubahan target penanggulangan bencana banjir.
- b. Ketersediaan struktur pengawasan mencakup pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas.
- c. Kejelasan desain Kelembagaan mencakup organisasi pelaksana dan koordinasi internal dan antar organisasi.
- d. Ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan (SDM, keuangan, teknologi dan informasi).
- e. Kemampuan melaksanakan SOP penanggulangan bencana banjir.
- f. Tingginya penerimaan sosial mencakup tingkat kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dan keterlibatan masyarakat.

3.8. Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana (studi tentang penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah)

- a. Ketidaktepatan pilihan dan kesulitan pelaksanaan instrumen kebijakan penanggulangan bencana banjir.
- b. Rendahnya kemampuan administratif berupa kurangnya sumberdaya yang dibutuhkan (SDM, keuangan, teknologi dan informasi).

3.9. Diskusi Temuan Utama Hasil

Penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli dilakukan dengan pendataan terhadap warga yang terkena dampak banjir selama tiga tahun berturut-turut dimulai pada tahun 2020 sampai tahun 2022, dimana berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan setiap tahunnya warga yang terkena dampak bencana banjir. Menindaklanjuti hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli melakukan pendataan dan melakukan pengecekan ke titik-titik posisi banjir yang terjadi sesuai pada data yang telah tercantum.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian (Opsional)

Penulis menemukan fakta di lapangan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang terkena dampak dari adanya bencana banjir, bahkan setiap tahunnya banjir masih saja meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Toli-Toli belum terlaksana dengan maksimal disebabkan oleh banyak faktor.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Tentang Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah), peneliti menyimpulkan bahwa

1. Faktor pendukung implementasi kebijakan penanggulangan bencana (studi tentang penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah) sebagai berikut:
 - a. Kejelasan desain kebijakan mencakup prosedur, waktu, dan sumberdaya serta perubahan target penanggulangan bencana banjir.
 - b. Ketersediaan struktur pengawasan mencakup pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas.
 - c. Kejelasan desain Kelembagaan mencakup organisasi pelaksana dan koordinasi internal dan antar organisasi.
 - d. Ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan (SDM, keuangan, teknologi dan informasi).
 - e. Kemampuan melaksanakan SOP penanggulangan bencana banjir.
 - f. Tingginya penerimaan sosial mencakup tingkat kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dan keterlibatan masyarakat.

Faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana (studi tentang penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah)

- a. Ketidaktepatan pilihan dan kesulitan pelaksanaan instrumen kebijakan penanggulangan bencana banjir.
 - b. Rendahnya kemampuan administratif berupa kurangnya sumberdaya yang dibutuhkan (SDM, keuangan, teknologi dan informasi).
2. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi tentang Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah)
- a. Pemberian pelatihan mitigasi bencana kepada personil BPBD Kabupaten Tolitoli.
 - b. Peningkatan anggaran penanggulangan bencana.
 - c. Pengoptimalan teknologi dan informasi penanggulangan bencana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih terdapat keterbatasan, yaitu adanya keterbatasan informasi yang didapatkan penulis dan keterbatasan waktu yang dimiliki penulis selama proses penelitian dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis berharap bahwa dalam penelitian kedepannya yang mengambil fokus masalah yang sama dan lokasi yang sama agar mampu untuk melakukan penelitian secara komprehensif dan mendalam dari setiap aspek yang terkait di Kabupaten Toli-Toli, karena hasil penelitian ini masih belum maksimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan kepada Kepala Satuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian dalam memberikan jawaban wawancara, membantu pelaksanaan observasi yang dilaksanakan oleh penulis, dan membantu proses dokumentasi yang sangat berguna untuk membantu pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2023). Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI). BNPB. <https://dibi.bnpb.go.id/home/index2>
- BPBD Kab. Tolitoli. (2023). Jumlah Bencana Banjir dan Warga Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Tolitoli.
- BPBD Prov. Sulawesi Tengah. (2023). PUSDALOPS-PB SULTENG. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. <https://www.pusdalops-bpbdsulteng.com/>
- BPS. (2023). Badan Pusat Statistik. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/>
- Dwi, A., Yulianti, T., & Susiantoro, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Pada Tahap Tanggap Darurat Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. ... *Nasional Hasil Skripsi*. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/view/1045>
- Fransari, E., Warouw, S. P., & Brahmana, N. E. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Masyarakat Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 11(2), 201–211.
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy: A New Introduction*. Bloomsbury Publishing.
- Mosshananza, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di

- Kecamatan Sidomulyo oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. *DEMOKRASI*, 2(2).
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana banjir di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana
- Putri, L. E. (2022). Evaluasi Peran Pemerintah Nagari Aia Gadang dalam Menghadapi Ancaman Bencana Banjir. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 2(3), 317–324.
- Saidah, D. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 Di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan). *Jurnal Media Birokrasi*, 185–202.
- Silalahi, B., & Harahap, M. E. (2021). *Penyebab Potensi Banjir di Daerah Aliran Sungai Deli Kota Medan*. Penerbit Adab.
- Suharto, S., & Setiawan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Bpbd Kota Semarang Tahun 2020). *SPEKTRUM*.
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/6656>
- Suryadi, N. (2020). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2, 425–436.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wurin, K. M., & Wardhono, H. (2022). *Evaluasi Implementasi Penanganan bencana Banjir Di Desa Lamanela Kecamatan Ileboleng Nusa Tenggara Timur*.
- Yusup, M. A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kota Bekasi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(4).